

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai dengan metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada. Metode yang menggambarkan suatu gejala yang ada pada waktu penelitian, yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh pada lokasi penelitian, maka diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis Bab 4:

1. Kebijakan PPh Pasal 21 yang diterapkan perusahaan adalah kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yang lebih menguntungkan adalah kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban dan tunjangan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan.

Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada besar kecilnya laba perusahaan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang, dan *take home pay*. Jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh pasal 21 di *gross up*, maka tingkat laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan ketiga alternatif lainnya, ini akan berdampak pada pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil dan

perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang tidak berbeda dengan alternatif pertama dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang merupakan selisih terbesar. Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* tersebut tampaknya sebagai pemborosan, namun perlu diperhatikan, akibat biaya fiskal yang besar akan berdampak pada laba, laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan juga akan menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sudut pandang karyawan, dengan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar. Jika dilihat dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka alternatif kebijakan ini menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan alternatif pertama dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial adalah kebijakan PPh pasal 21 di *gross up*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan, dan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, peneliti menyarankan:

1. Bagi Perusahaan

Peneliti menyarankan perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*. Hal ini dikarenakan, kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada menggunakan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, yang selama ini diterapkan perusahaan, yang dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung perusahaan. Bagi karyawan, dengan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar dan menguntungkan bagi karyawan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya, dalam melakukan perhitungan kebijakan alternatif PPh Pasal 21 harus teliti. Perusahaan yang memiliki sedikit karyawan atau banyak karyawan, rancangannya bervariasi menurut jumlah karyawan dan penghasilan karyawan dan sejauh mana komputer itu dipakai untuk perhitungan. Peneliti yang ingin melakukan penelitian di perusahaan kecil yang memiliki jumlah karyawan sedikit akan memudahkan perhitungan PPh Pasal 21 dan perhitungan tunjangan pajak dalam rangka

gross up sebab kebijakan-kebijakan alternatif ini harus teliti dalam perhitungannya sehingga dalam penerapan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 akan berpengaruh pada besar kecilnya PPh terutang, tingkat laba perusahaan dan *take home pay*. Biaya komersial dan biaya fiskal atas pembayaran gaji karyawan juga merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemilihan alternatif tersebut.